

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2020 - 2050

MATRIK PROGRAM RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 - 2050

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN RUED	LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)			
Kebijakan Utama - 1: Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Energi Daerah										
1	Meningkatkan eksplorasi sumberdaya, potensi, dan/atau cadangan terbukti energi dari energi baru terbarukan	1 Peningkatan kualitas data potensi Energi Baru dan Terbarukan	1	Melakukan validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data potensi panas bumi, bioenergi, surya, air, angin dan laut dengan mengacu pada data potensi saat ini sebesar: Potensi Panas Bumi: 262 MW Potensi Mini/Mikro Hidro: 15 MW Potensi Bioenergi: 191,6 MW Potensi Surya: 1.254 MW Potensi Angin: 1.019 MW Potensi Air: 208 MW Potensi Laut: 320 MW	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2020 - 2050	
			2	Melakukan survei potensi di lokasi baru yang terindikasi dalam rangka meningkatkan kuantitas potensi air, bioenergi, surya, angin, arus laut, gelombang laut dan perbedaan suhu lapisan laut, serta EBT lainnya		APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2020 - 2050	
2	Penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi untuk rumah tangga, transportasi, industri dan pertanian	1 Peningkatan rasio elektrifikasi	1	melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan program Pemerintah dalam rangka menjamin peningkatan rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2019		APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, PT. PLN	RPJMD, Rencana Strategis	2020 - 2050	
			2	Pembangunan infrastruktur energi untuk industri	1	Memfasilitasi pembangunan wilayah Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk penyediaan lahan maupun insentif fiskal maupun non fiskal lainnya sesuai Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) yang telah disusun	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, DinasPUPRPerkim	RPJMD, Rencana Strategis, RTRW	2020 - 2050
3	Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi	1	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Memfasilitasi penyediaan lahan dan kemudahan lainnya berupa insentif baik fiskal maupun non fiskal dalam rangka mewujudkan pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik nasional dengan target: PLTS/Roof Top : 200 MW PLTB: 5 MW PLTBm: 0,9 MW PLTSa: 10 MW PLTU/GU/MG: 553,45 MW	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Biro Ekbang, Badan Usaha, PT. PLN, PT. Pertamina	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2024 2023 2023 2024 2020-2025

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN RUED	LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
		2 Membangun Infrastruktur ketenagalistrikan tambahan melalui pendanaan di luar APBD maupun skema kerjasama dengan Badan Usaha di luar dari yang telah diprogramkan dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik dengan target penambahan : PLTMG/PLTGU : 1.700 MW PLTS/Roof Top : 660 MW PLTB : 5 MW PLT Biomasa : 0,9 MW PLTSa: 10 MW PLTM/MH : 26 MW		APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Biro Ekbang, Badan Usaha, Biro Pem dan Kesra, Dinas PUPRPerkim, Dinas KP, Dishub	RPJMD, Rencana Strategis, RTRW, RZWP3K	2050 2050 2050 2050 2050	
		3 Memfasilitasi pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan gardu induk termasuk Jawa Bali Connection (JBC) 500 kV	Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, PT PLN dan Badan Usaha lainnya	RUPTL dan RUKD	2020-2025	
		4 Menyusun Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) pembangunan pembangkit berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketersediaan jaringan ( <i>On grid, Mini Grid, dan Off Grid</i> ) berdasarkan wilayah	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, PT PLN, Akademisi	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2019-2020	
		4 Menurunkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel dengan target tahun 2030	Bali	APBD	Dinas ESDM	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2030	
	2 Pembangunan Infrastruktur BBM dan LPG	1 Memfasilitasi pembangunan jaringan distribusi BBM, seperti SPBU, SPBN dan APMS	Kabupaten/Kota	Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Badan Usaha, PT. Pertamina	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2020-2050	
		2 Memfasilitasi pembangunan jaringan distribusi LPG seperti SPBE		Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Badan Usaha, PT. Pertamina	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2020-2050	
	3 Pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi	1 Menyusun Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) infrastruktur dan distribusi gas serta menyiapkan HUB LNG di Bali Utara atau pengembangan di Selatan	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Biro Ekbang, Badan Usaha	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2020-2050	
4	Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	1 Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi	1 Mengakomodir pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi ke dalam RTRW Daerah	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Dinas PUPRKIM	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
		2 Menyempurnakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur terkait besaran pajak air permukaan dan air tanah yang telah mempertimbangkan asas manfaat dari keberadaan pembangkit tenaga air		APBD	Disnaker ESDM, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas PUPRKIM, Dinas PM&PTSP, Bapenda dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup,	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050	
		3 Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk menjamin penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain		APBD	Disnaker ESDM, Bappedalitbang, Dinas PUPRKIM	Dokumen RTRW	2009-2029	

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN RUED	LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)		
Kebijakan Utama - 2: Prioritas Pengembangan Energi Bersih									
1	Pengembangan energi bersih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah	1 Peningkatan kebutuhan energi daerah	1	Menyusun Peta Jalan ( <i>roadmap</i> ) pembangunan infrastruktur energi bersih berdasarkan survey yang telah dilakukan	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Akademisi	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			2	Mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid)	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Akademisi, PT. PLN	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			3	Menyusun roadmap pengembangan kawasan industri termasuk prioritas pengembangan jenis industri yang disesuaikan dengan potensi energi di wilayah setempat	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Akademisi	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
2	Pengembangan penggunaan gas bumi (LPG, LNG dan CNG)	1 Pembangunan infrastruktur gas bumi	1	Menfasilitasi pembangunan infrastruktur gas di Bali Utara dan Selatan berikut dengan distribusi dan transportasinya	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Biro Ekbang, Badan Usaha	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2020-2050
3	Pengembangan penggunaan PLTS / PLTS Atap	1 Pengembangan dan pembangunan PLTS dan PLTS Atap	1	Menfasilitasi pembangunan dan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui Badan Usaha, serta menyiapkan Peraturan Gubernur untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan Tenaga Surya	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Biro Ekbang, Badan Usaha, Dinas KLH, Biro Pem dan Kesra	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2020-2050
4	Pengembangan pengolahan sampah perkotaan	1 Pengolahan sampah perkotaan untuk Energi ( <i>waste to energy</i> )	1	Menfasilitasi pembangunan PLTSa melalui Badan Usaha, serta menyiapkan Peraturan Gubernur untuk pengolahan dan pemanfaatannya	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Biro Ekbang, Badan Usaha, Dinas KLH, Biro Pem dan Kesra	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2020-2050
5	Pengembangan pemanfaatan tenaga angin	1 Pembangunan PLTBayu sesuai dengan potensi setempat	1	Menfasilitasi pembangunan PLTBayu melalui Badan Usaha, serta menyiapkan Peraturan Gubernur untuk pengolahan dan pemanfaatannya	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Biro Ekbang, Badan Usaha, Dinas KLH, Biro Pem dan Kesra	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2020-2050
6	Pengembangan pemanfaatan energi biomassa	1 Pembangunan PLTBiomassa sesuai dengan potensi setempat	1	Menfasilitasi pembangunan PLTBiomassa melalui Badan Usaha, serta menyiapkan Peraturan Gubernur untuk pengolahan dan pemanfaatannya	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Biro Ekbang, Badan Usaha, Dinas KLH, Biro Pem dan Kesra	Dokumen Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> )	2020-2050
7	Pengembangan pemanfaatan energi air skala kecil	1 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi tenaga air dan melakukan pemetaan rinci untuk pengembangan pembangkit hidro skala kecil	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Dinas PUPRKIM, Akademisi	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
8	Pengembangan pemanfaatan biogas	1 Pembangunan biogas sebagai substitusi minyak tanah/LPG untuk sektor rumah tangga	1	Melakukan sosialisasi manfaat penggunaan kandang bersama untuk hewan ternak dalam rangka pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas yang dapat dijadikan sumber energi untuk rumah tangga	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Dinas Peternakan	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
9	Pengembangan pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri	1 Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN untuk sektor industri	1	Menfasilitasi pengembangan industri Biodiesel dan bioethanol sebagai campuran BBM untuk pemanfaatan sektor industri	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Bappeda, BARI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN RUED	LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)			
Kebijakan Utama - 3: Pemanfaatan Sumber Daya Energi Baru Terbarukan Daerah										
1	Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan untuk ketenagalistrikan melalui peningkatan peran EBT dalam bauran energi	1 Peningkatan peran EBT dalam bauran energi	1	Meningkatkan peran EBT: a. Menjadi paling sedikit 11,15 % sampai dengan tahun 2025, dengan penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT paling sedikit 228 MW: 1) PLTS = 213 MW 2) PLTMH 2,8 MW 3) PLTSa 10 MW 4) PLTBiomass 0,9 MW 5) PLTBayu 1,3 MW b. Menjadi paling sedikit 20,10% sampai dengan tahun 2050, dengan penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT paling sedikit 537 MW: 1) PLTS/Roof Top = 500 MW 2) PLTMH = 6 MW 3) PLTSa = 20 MW 4) PLTLaut = 4 MW 5) PLTBiomass = 3 MW 6) PLTB = 4 MW	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Biro ekbang, Badan Usaha, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR Perkim	RPJMD, Rencana Strategis, RTRW, RZWP3K	2020-2050	
2	Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan dari sinar matahari melalui pengembangan PLTS/PLTS Atap	1 Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber energi sinar matahari untuk ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan	1	melakukan studi keekonomian pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan sebagai masukan Pemerintah Pusat dalam merumuskan patokan harga serta skema pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Biro Ekbang, Badan Usaha, Akademisi, BARI	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
			2	memfasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Biro Ekbang, Badan Usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RPJMD, Rencana Strategis, RTRW	2020-2050	
			3	melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam mendorong pemanfaatan PLTS untuk fasilitas transportasi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, peralatan bongkar muat, dan lain-lain)	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Biro Ekbang, Badan Usaha, Dishub, Dinas KP	RPJMD, Rencana Strategis, RTRW, RZWP3K	2020-2050	
		2	Pemanfaatan energi sinar matahari untuk industri dan gedung komersial	1	menyusun peraturan daerah/gubernur dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 20 % dari luas atap bangunan atau daya terpasang kompleks industri, sosial dan bangunan komersial, penerangan jalan umum serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Biro Hukum, Bappeda, BARI, Dinas Pariwisata, Dinas PM&PTSP, Dinas PUPRKIM, Dinas Perhubungan, Badan Usaha, PT. PLN	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
		3	Pemanfaatan sel surya untuk bangunan rumah tangga	1	menyusun peraturan daerah/gubernur dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 20 % dari luas atap bangunan atau daya terpasang dengan luas bangunan di atas 500 m2 rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Biro Hukum, Bappeda, BARI, Dinas PM&PTSP, Dinas PUPRKIM, PT. PLN	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
		4	Pemanfaatan sel surya untuk bangunan Pemerintah	1	menyusun peraturan daerah/gubernur dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 20 % dari luas atap untuk seluruh bangunan atau daya terpasang milik Pemerintah Pusat dan milik Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Biro Hukum, Bappeda, BARI, Dinas PM&PTSP, Dinas PUPRKIM, PT. PLN	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN RUED		LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)		
3	Pemanfaatan sumber EBT dari air melalui pengembangan PLTMH	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro dan Mikrohidro	1	Menyempurnakan peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur terkait besaran pajak air permukaan dan air tanah yang telah mempertimbangkan asas manfaat dari keberadaan pembangkit tenaga air	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas KLH, Dinas PUPRKIM, BARI, Akademisi, Biro Hukum, Bapenda	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050		
				2	Melakukan validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data potensi Mini/Mikro Hidro: 26 MW Tahun 2050	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, BARI, Akademisi, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050		
4	Pemanfaatan sumber EBT dari angin melalui pengembangan PLTBayu	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin	1	Melakukan validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data potensi tenaga angin dengan mengacu pada data potensi saat ini	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, BARI, Akademisi	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050		
				2	Melakukan survei potensi tenaga angin untuk daerah atau wilayah yang belum mempunyai pengukuran potensi	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, BARI, Badan Usaha, Akademisi	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050		
				3	Menyusun pre-studi kelayakan setiap tahunnya untuk daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi angin	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, BARI, Akademisi	Dokumen Pre-FS	2020-2050		
5	Pemanfaatan sumber EBT dari Bioenergi melalui pengembangan Biomassa, Biogas dan BioNabati	1	Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi	1	memberikan dukungan yang diperlukan oleh Kementerian terkait dalam rangka penerapan kebijakan pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat khususnya angkutan umum kota/perkotaan, transportasi laut termasuk kapal nelayan, dan transportasi udara sampai 2025	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas KKP, Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050		
				2	Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi	1	Menfasilitasi dalam menyediakan lahan kritis secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku BBN dan kombinasi dengan pemanfaatan energi baru terbarukan lainnya	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas KLH, Bappeda, BARI, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis, RTRW	2020-2050
				3	Pembangunan PLT Bioenergi	1	Membangun pembangkit listrik tenaga biomassa paling sedikit satu unit	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas KLH, Bappeda, BARI, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
				2	Menyusun Roadmap pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah dengan target pada tahun 2025 sebesar 10 MW dan pada tahun 2050 sebesar 20 MW	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas KLH, Bappeda, BARI, Badan Usaha, Akademisi, Biro Pem dan Kesra	Dokumen Roadmap	2020-2050		
				3	Menetapkan skema pengelolaan TPS dalam rangka mengoptimalkan hasil biogas dari pengelolaan sampah untuk dapat dimanfaatkan sebagai suplai untuk PLTSa	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas KLH, Bappeda, BARI	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050		
4	melakukan koordinasi terkait program pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di kota Denpasar melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan pemerintah	Kota Denpasar	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas KLH, Bappeda, BARI, Biro Pem dan Kesra	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050						

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN RUED		LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4	Pembangunan infrastruktur biogas	1	Menyusun peta jalan pengembangan biogas per desa atau wilayah yang mempunyai potensi	Kabupaten/Kota	APBD	Dinas ESDM, Dinas Peternakan, Akademisi, BARI, Badan Usaha	Dokumen Roadmap	2020-2050
				2	Menfasilitasi pembangunan digester biogas di setiap desa atau wilayah sesuai dengan target peta jalan	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Dinas ESDM, Dinas Peternakan, BARI, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
Kebijakan Pendukung-1: Konservasi Energi, dan Diversifikasi Energi										
1	Konservasi Energi	1	Pelaksanaan kebijakan konservasi energi	1	melakukan evaluasi terhadap penerapan kegiatan konservasi sesuai dengan PP 70 tahun 2009 tentang konservasi energi	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
				2	Melakukan pengaturan pemakaian energi yang ramah lingkungan dan efisien pada kawasan pengguna energi terintegrasi	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
		2	Penyediaan energi mengutamakan sumber daya energi yang lebih lestari	1	Melakukan konservasi wilayah tangkapan air disekitar lokasi sumber air dalam rangka menjaga pasokan air serta mengurangi pendangkalan	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, dinas KLH, Dinas PUPRKIM, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
		3	Pengembangan konservasi dan efisiensi energi di sektor industri	1	menyusun peraturan di daerah terkait penerapan manajemen pengelolaan energi yang berlandaskan efisiensi dan konservasi energi pada industri lahap energi dan industri besar	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
				2	melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengelolaan energi yang efisien terhadap keberlanjutan dan daya saing industri prioritas dan IKM	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
		4	Penerapan sistem manajemen energi	1	melaksanakan audit energi berkala yang dimulai dari industri lahap energi, industri besar, sektor komersial dan industri kecil menengah	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
		5	Penerapan standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna energi	1	menerapkan standar terkait rancang bangun gedung hemat energi sesuai dengan kebijakan Pemerintah pada gedung pemerintah, gedung swasta dan gedung lainnya	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, BARI, Akademisi, Badan Usaha	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
		6	Sosialisasi budaya hemat energi	1	Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN RUED	LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
	7 Percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien dengan menggunakan motor listrik berbasis baterai	1 menyusun peta jalan ( <i>roadmap</i> ) pengembangan angkutan bus listrik, kereta api listrik dan kendaraan listrik sampai dengan tahun 2050	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	Dokumen Roadmap	2020-2050	
		2 memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung bagi terciptanya pengembangan kendaraan listrik seperti SPLU	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, PT. PLN, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
		3 menyusun peraturan di daerah terkait pengembangan kendaraan listrik	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050	
		4 memfasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan kereta api listrik	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
		5 melakukan kajian penerapan pengembangan angkutan massal terpadu kereta listrik, bis listrik sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, BARI, Akademisi	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
		6 mendukung dan memfasilitasi pembangunan sistem transportasi cerdas ( <i>Intelligent Transport System /ITS</i> ) dan sistem pengendalian lalu lintas ( <i>Area Traffic Control System /ATCS</i> ) serta pembatasan angkutan barang masuk kota di kota-kota besar Bali	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Badan Usaha, Biro Ekbang	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
		7 Menerapkan manajemen parkir kendaraan termasuk zona parkir dengan tarif tinggi khusus di kota Denpasar	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
		8 menyusun kajian penerapan wilayah terpadu dengan jalur transportasi ( <i>Transit Oriented Development /TOD</i> ) di Bali	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
	8 Percepatan penerapan jalan berbayar ( <i>Electronic Road Pricing/ ERP</i> ) untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi	1 memfasilitasi penerapan kebijakan ERP pada jalan-jalan utama kota/perkotaan	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
	2 Diversifikasi Energi	1 Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi	1 mengkaji kebijakan penggunaan gas untuk sektor transportasi	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, BaRI, Akademisi	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			2 Meningkatkan secara bertahap jumlah kendaraan yang menggunakan mesin BBG ( <i>dedicated engine</i> )	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
		3 Mengalokasikan anggaran intensifikasi penggunaan BBG dalam APBD	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Bappeda, BRI	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
		4 meningkatkan penggunaan gas sektor rumah tangga melalui pembangunan jaringan gas kota dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan infrastrukturnya	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Badan Usaha, Bappeda, Biro Ekbang, Biro Pem dan Kesra	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
		5 Mengadakan digester biogas dengan target 150 rumah tangga pada tahun 2025	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Peternakan, Bappeda, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	



STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN RUED		LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3	Pemanfaatan sumber energi gas untuk sektor transportasi	1	Optimalisasi penggunaan gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga dan transportasi yang memiliki nilai tambah paling tinggi	1	Mewajibkan kendaraan Pemerintah Daerah menggunakan bahan bakar gas bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur gas atau motor listrik berbasis baterai	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Biro Ekbang, Perusda Bali, Dinas Perhubungan, Badan Usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
Kebijakan Pendukung-2: Lingkungan Hidup dan Keselamatan										
1	Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi	1	Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi	1	melaksanakan audit energi berkala yang dimulai dari industri lahap energi, industri besar, sektor komersial dan industri kecil menengah	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Badan Usaha, Dinas KLH	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
				2	melakukan identifikasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan usaha untuk menurunkan dampak dari gas rumah kaca melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara berkala dengan tetap melakukan koordinasi dengan kegiatan Pemerintah	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas KLH, Bappeda	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
2	Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan	1	Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak lingkungan hidup	1	Mengintegrasikan kebijakan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas KLH, Bappeda	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
		2	Pengurangan dan penggunaan kembali produksi limbah, serta mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan	2	Mendorong peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip 3R ( <i>reuse, reduce, and recycle</i> )	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas KLH	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
		3	Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan	3	Memfasilitasi proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk perusahaan tenaga air, panas bumi, termasuk sarana dan prasarana, dan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bappeda, BaRI, Dinas PM PTSP	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
Kebijakan Pendukung-3: Harga, subsidi dan insentif energi										
1	Harga energi yang berkeadilan	1	Perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi terbarukan dari sumber setempat dalam rangka mandiri energi di daerah	1	Menfasilitasi kelayakan keuangan dalam pembangunan unit pembangkit PLTS/hybrid, PLT Bioenergi, PLT Bayu, PLTSa, PLTBm, Tenaga Laut untuk menjaga kemandirian energi di daerah	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Badan Usaha, Biro Ekbang, BPKAD, Bapenda	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
				2	Menyusun peraturan terkait dengan skema kerjasama dan tarif khusus / tarif hijau harga dalam rangka meningkatkan peluang investasi energi terbarukan dari sumber setempat khusus di daerah	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Bapenda, Biro Hukum, PLN	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
2	Insentif penggunaan Energi Baru Terbarukan	1	Pemberian subsidi / insentif energi tepat sasaran	1	Menyusun kebijakan terkait pemberian subsidi energi bagi masyarakat yang tidak mampu serta mengembangkan skema baru pemberian subsidi energi kepada masyarakat yang memungkinkan melalui pendanaan APBD	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Bapenda, Biro Ekbang	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
3	Insentif penggunaan transportasi massal	1	Pemberian insentif non fiskal EBT dalam penggunaan transportasi massal	1	menerapkan kebijakan izin satu pintu serta penyederhanaan perizinan dalam rangka meningkatkan investasi sektor energi dan pemberian insentif pada penyediaan/penggunaan transportasi massal	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas PM PTSP	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050



STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN RUED	LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
Kebijakan Pendukung-4: Infrastruktur dan akses untuk masyarakat dan industri energi								
1	Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi	1 Pemberian akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan energi	1 Memperluas informasi kebijakan dan pembangunan bidang energi berbasis teknologi informasi dan media sosial	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Diskominfo	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			2 Memberikan kesadaran pemanfaatan energi yang produktif dan efisien kepada masyarakat	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			3 Membentuk brigade energi untuk memberi penyuluhan energi kepada masyarakat di berbagai daerah	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
		2 Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi	1 memfasilitasi pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan yang dibangun oleh badan usaha penyedia ketenagalistrikan dalam rangka mempercepat pembangunan jaringan tersebut	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Badan Usaha, PT. PLN	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			2 Menfasilitasi pembangunan jaringan listrik melalui pendanaan APBD atau skema lainnya bagi daerah yang belum memiliki akses terhadap listrik yang handal	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Badan Usaha, PT. PLN	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			3 Menfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung BBM/BBG untuk sektor transportasi serta jaringan gas kota untuk rumah tangga dan komersial	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Badan Usaha, Biro Ekbang, BPKAD, Bapenda	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
	4 Menfasilitasi pembangunan jaringan listrik melalui pendanaan APBD atau skema lainnya bagi daerah yang belum memiliki akses terhadap listrik yang handal		Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Badan Usaha, Biro Ekbang, PT PLN	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
	3 Peningkatan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri	1 Memfasilitasi (skema <i>public, private partnership</i> ) pembangunan industri manufaktur penunjang industri energi dan jasa energi dalam negeri	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, Badan Usaha, Biro Ekbang, Biro Pem dan Kesra	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
	4 Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi dan pemanfaat energi terbarukan dalam negeri	1 melakukan identifikasi pengembangan industri peralatan penunjang dan pemanfaatan energi terbarukan berdasarkan ketersediaan bahan baku dan besaran <i>demand</i>	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, Dinas Perindustrian, BARI	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
		2 melakukan sosialisasi terhadap manfaat penggunaan peralatan listrik untuk keperluan rumah tangga dalam hal tingkat efisiensi dan kehandalan yang lebih tinggi	Kabupaten/Kota	APBD	Disnaker ESDM, BaRI	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050	
	Kebijakan Pendukung-5: Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi							
	1	Pengembangan kemampuan pengelolaan energi	1 Pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta badan usaha	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
2	Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan insatalasi EBT	1 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi serta keselamatan bidang energi	1 Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi melalui kerjasama dengan kementerian terkait dan badan usaha melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi aparatur terkait	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM dan BPSDM	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			2 Pembangunan Politeknik Energi dan Pertambangan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Pusat Studi Energi Baru Terbarukan	Kabupaten Bangli atau Lokasi Pilihan lainnya berdasarkan hasil kajian teknis	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM dan BPSDM, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2022-2023

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN RUED	LOKASI	PEMBIAYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)		
Kebijakan Pendukung-6: Kelembagaan dan pendanaan									
1	Penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi dan mendorong Badan Usaha serta perbankan untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi	1 Penyempurnaan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi	1	mendukung kebijakan penyederhanaan perizinan serta melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Dinas PM&PTSP	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			2	membangun sistem layanan perizinan satu pintu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Dinas PM&PTSP	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			3	Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM	RPJMD, Rencana Strategis, Pergub	2020-2050
			4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah yang mendukung percepatan penerbitan/ penyederhanaan izin dan pembangunan infrastruktur energi di daerah	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Dinas PM&PTSP	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			5	Memperkuat kapasitas organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Biro Organisasi	RPJMD, Rencana Strategis, Pergub	2020-2050
			6	Memfasilitasi kerja satuan kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan/atau tumpang tindih kewenangan di daerah	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Biro Organisasi	RPJMD, Rencana Strategis, Pergub	2020-2050
	2	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah dalam pengelolaan energi	1	Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang energi	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, BPSDM, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			3	Pengalokasian dana untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur energi yang memadai	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
	4	Penyediaan alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan energi	1	Menganggarkan pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan terlistriki dalam jangka panjang	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			2	Menganggarkan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG / Bio ethanol	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Badan Usaha	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
			3	Menyediakan subsidi energi yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	Kabupaten/Kota	APBD	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Bapenda, BPKAD	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050
	5	Peningkatan peran swasta dan pendanaan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi	1	Memberi kesempatan berusaha dan peran yang lebih luas kepada badan usaha untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pemanfaatan energi	Kabupaten/Kota	APBD, Sumber pembiayaan lain yg sah dan tidak mengikat	Bappeda, BaRI, Disnaker ESDM, Badan Usaha, Biro Ekbang, Dinas PM dan PTSP	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2020-2050

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER